

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
PULAU UNTUNGJAWA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM DAN KEMANDIRIAN NELAYAN**

Oleh :

Derta Rahmanto

Endang Purwaningsih

Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

Email : derta.rahmanto@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Kelurahan Pulau Untung Jawa merupakan salah satu dari enam kelurahan di wilayah kepulauan Seribu atau satu di antara tiga kelurahan di wilayah kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Penduduk Pulau Untung Jawa sebagian besar adalah masyarakat pribumi yang silsilahnya berasal dari Pulau Untung Jawa dan perpindahan masyarakat Pulau Ubi Besar tanggal 13 Februari 1954. Kelurahan Pulau Untung Jawa merupakan kawasan andalan Wisata Pemukiman yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan visi kabupaten yaitu:” Sebagai Taman dan Ladang Kehidupan Bahari yang Berkelanjutan” Penelitian ini menemukan model pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat pesisir pulau UntungJawa dan menganalisis upaya peningkatan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan Pulau UntungJawa. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, atau dalam penelitian hukum biasa disebut normatif terapan/normatif empiris. Model pemberdayaan yang bertujuan membangun kemandirian nelayan pulau UntungJawa dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Perlu sinergitas antara peran pemerintah baik aparat kelurahan dan instansi terkait lainnya, LSM yang peduli atau pun perusahaan, kampus maupun masyarakat nelayan itu sendiri. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang harus diperhatikan dan dicarikan solusinya. Faktor pendukung antara lain sudah terbangun konsep kesadaran dalam melakukan segala macam kegiatan yang sesuai dengan hukum yang ada, potensi wisata dan produksi perikanan, aparat Kelurahan yang cukup aktif dan kesiapan SDM untuk memotivasi diri dan menerima pendampingan serta berbagai pelatihan. Adapun faktor penghambatnya antara lain: terbatasnya modal, faktor alam, sarana prasarana, kurangnya gairah wisata, daya minat beli dan daya minat permainan air, tidak adanya penghasilan rutin, honor pekerja yang kurang dari UMP, SDM, dan kurangnya kesadaran hukum, bantuan hukum dan perlindungan hukum.

Kata kunci: pemberdayaan, kesadaran, kemandirian, nelayan

ABSTRACT

Residence of Pulau Untung Jawa is one of six residences in Kepulauan Seribu in District of Kepulauan Seribu Selatan. The residents living in Pulau Untung Jawa are not only native people who were born in this island, but also people who migrated from Pulau Ubi Besar on 13rd February 1954. The residence is a special area taking an important part to establish a garden and field of a sustainable life around the maritime culture. Mainly, this research finds an appropriate scheme of empowerment for the residents. Furthermore, this research also studies an approach on how their legal awareness and independence can be enhanced. The researcher proposes a postulate that the empowerment requires between the government and other related institutions, such as: non-governmental organisations, companies, campuses, and the society. Several factors, in example: the sufficient legal awareness, potential tourist destination, and highly productive fishing industries. On the other hand, there are several obstacles considered to resist the empowerment, such as: capital, minimum wages, human resources, legal awareness, and legal aids.

Keywords: *Empowerment, Awareness, Independence, Fishermen*

PENDAHULUAN

Kecamatan Kepulauan Seribu merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kotamadya Jakarta Utara yang ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi berdasarkan Bab IX (Ketentuan Peralihan) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta. Kelurahan Pulau Untung Jawa merupakan salah satu dari enam kelurahan di wilayah kepulauan Seribu atau satu di antara tiga kelurahan di wilayah kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

Penduduk Pulau Untung Jawa sebagian besar adalah masyarakat pribumi yang silsilahnya berasal dari Pulau Untung Jawa dan perpindahan masyarakat Pulau Ubi Besar tanggal 13 Februari 1954. Kultur budaya Banten juga melekat kuat pada masyarakat Pulau Untung Jawa karena sebagian di antara mereka ada yang menikah dengan masyarakat pesisir Tangerang sehingga terjadi akulturasi budaya di antara mereka. Semua penduduk di wilayah kelurahan Pulau Untung Jawa beragama islam dan hampir rata-rata merupakan penduduk asli pulau. Ketergantungan masyarakat terhadap alam cukup tinggi karena sebagian besar mata pencaharian penduduk didominasi nelayan, adapun mata pencaharian lainnya sebagai pedagang, PNS dan swasta. Pulau Untung Jawa merupakan pintu

gerbang Kepulauan Seribu dalam artian merupakan pulau berpenduduk paling dekat dengan daratan Jakarta Utara (Dermaga Marina Ancol). Kelurahan Pulau Untung Jawa merupakan kawasan andalan Wisata Pemukiman yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan visi kabupaten yaitu:” Sebagai Taman dan Ladang Kehidupan Bahari yang Berkelanjutan”.

Masyarakat pesisir di Pulau Untung Jawa sebagai cerminan masyarakat marginal ini perlu dibantu, guna mengatasi berbagai masalah, seperti persoalan kemiskinan, pendidikan rendah, kesadaran hukum dan berwirausaha juga rendah, yang berujung pada buruknya kesehatan dan tingkat ekonomi, dengan pendekatan partisipatif, yakni secara aktif melibatkan peranserta masyarakat yang kebanyakan adalah keluarga nelayan. judnya kesetaraan dalam hak dan kewajiban, sadar hukum, melek huruf, mengamalkan keyakinan agamanya dalam kehidupan bermasyarakat, mandiri, ketergantungan pada pemerintah berkurang, selanjutnya menjadi masyarakat sejahtera yang kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi dan timbul jiwa kemandirian yakni berkurangnya ketergantungan kepada pemerintah.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir adalah: kurangnya kesadaran akan hukum (perkawinan, perlindungan anak, perceraian) dan kesadaran pentingnya berbisnis serta wirausaha, kurangnya perhatian pemerintah secara berkelanjutan dalam menumbuhkan semangat wirausaha, penyadaran masyarakat yang kurang, dan pola pikir masyarakat belum sadar tentang kemiskinan, rawan gizi dan rawan tindak kejahatan, terbatasnya Sumber Daya Manusia yang akan menjadi penyuluh /pendidik bagi ibu-ibu agar ber-KB, juga terhadap bapak-bapak dan menyumbang perekonomian keluarga melalui wirausaha, kurangnya lapangan dan fasilitas yang memadai untuk menampung pengangguran (apalagi dengan UMR) dan kurangnya motivasi dan uluran tangan dari perguruan tinggi atau pun LSM untuk berwirausaha dan bantuan modal peralatan.

Masyarakat pesisir dimaksudkan adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kemiskinan sebagai indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini

disebabkan oleh tiga hal pokok, yaitu kemiskinan struktural, superstruktural, dan kultural (Nikijuluw, 2003).

1. Kemiskinan struktural adalah struktur sosial-ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan, khususnya sumberdaya alam.
2. Kemiskinan superstruktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel kebijakan makro yang tidak atau kurang berpihak pada pembangunan masyarakat nelayan.
3. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu yang menyebabkan individu yang bersangkutan sulit keluar dari kemiskinan karena faktor tersebut tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, atau dalam penelitian hukum biasa disebut normatif terapan/normatif empiris. Aspek yang diteliti dalam *need assesment* adalah: a. Penelusuran: (1) sosialisasi perundangan, (2) pengembangan SDM dan SDA, (6) informasi dan komunikasi, (7) perencanaan pengembangan dengan Ipteks, (8) monitoring dan evaluasi. b. Penelusuran insentif dan kemudahan dari kelembagaan dan kerjasama. c. Kebutuhan pelatihan tentang cara perlindungan dan upaya hukum.

PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN)

Berdasarkan wawancara di Pulau Untung Jawa, 16 November 2015 Lurah Untung Jawa, Badri menyatakan bahwa di pulau Untung Jawa terdapat 600 KK dengan jumlah warga 2089 orang. Pulau ini merupakan salah satu pulau dalam lingkup kepulauan Seribu yang beribukota di Pulau Pramuka yang dapat ditempuh dalam waktu 2 jam dari Pulau ini. Setiap hari Senin lurah rapat pimpinan di kabupaten. Sebenarnya kepulauan Seribu tidak terdiri atas pulau yang jumlahnya seribu, akan tetapi hanya 110 pulau.

Berdasarkan wawancara di Pulau Untung Jawa, 16 November 2015, dengan pekerjaan dan penghasilan selama ini, Nurhafa (wiraswasta) menyatakan

hambatan pasti ada, di mana usaha terbentur oleh modal (modal minim), musim (bila cuaca buruk, tamu yang berkunjung berkurang) dan pengunjung (pengunjung biasanya tergantung oleh tanggal gajian). Demikian pula Muchlis (nelayan) menyatakan ada hambatan yaitu musim angin barat dan musim hujan angin serta banyaknya nelayan di luar pulau Untung Jawa.

Sarman (nelayan) juga menyatakan ada hambatan yakni jaring dogol/jaring arat/jaring dokdok karena alat tangkap sangat merusak terumbu karang, dan nelayan banyak yang terganggu, dan jaring arat tersebut berasal dari Rawa Saban. Suryadi (wiraswasta) ada hambatan yakni kurangnya daya minat beli dan daya minat permainan air. Sartono (PNS) menyatakan masalah gaji tiap bulan lancar karena gaji tepat waktu, akan tetapi untuk tunjangan kinerja daerah baru diberikan setelah 3 bulan kerja.

Umiyatin (pedagang) menyiapkannya karena biaya kehidupan di pulau seribu 2x lipat dibanding biaya di daratan terutama biaya sehari-hari, A.Gofar (PNS) tidak ada hambatan yang berarti, Juli Alamsyah (Ketua RT 003/02) ada hambatan, yakni tidak adanya penghasilan rutin atau pasti. Iman menyatakan hambatannya adalah pembayaran honor yang kurang dari ump. Matadi/ Jasa angkutan kapal fery. Masalah pengunjung yang datang ke pulau UntungJawa sekarang di pulang-pergikan dari Tanjung Pasir, nelayan juga ada masalah dengan jaring dan tidak nyamannya karena banyak rampok. Abdullah (nelayan) hambatannya adalah permodalan.Abdul Rahman (Staf kelurahan) tidak ada hambatan. Fahrul Roji (Guru Honor) untuk hambatan pasti karena honor penghasilan 1 bulan Rp. 850.000.

Berdasarkan wawancara di Pulau Untung Jawa, 16 November 2015 harapan untuk masa depan anak-anak Untungjawa dan cara menyiapkannya Nurhafa (wiraswasta) menyatakan semoga anak kami lebih baik dari kami, dilihat dari segi pendidikan dan semuanya. Caranya dengan memberikan motivasi dan mendidik mereka dengan bekal moral agama, serta mempersiapkan materi untuk menyelesaikan pendidikan. Muchlis (nelayan) caranya dengan menyiapkan pendidikan yang baik. Sarman (nelayan) harapan saya anak-anak di Untung Jawa lebih maju lagi. Suryadi (wiraswasta) harapan kami untuk anak-anak kami agar mendapat kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera dan mengecam

pendidikan lebih tinggi. Untuk itu saya berusaha dan mendorong anak-anak kami agar kelak nanti mendapat masa depan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih layak. Sartono (PNS) Harapan supaya pendidikannya lebih baik yaitu dengan ilmu agama dan pendidikan formal yang seimbang dan dibantu oleh pengawasan orang tua. Umiyatin (pedagang) harapannya anak menjadi lebih baik, lebih bermanfaat khususnya di wilayah kepulauan, lebih sukses dalam segala bidang dengan cara memberikan pendidikan setinggi mungkin dan menyiapkan biaya.

A. Gofar (PNS) mereka harus di arahkan dan dididik sekolah yang lebih tinggi serta ditanamkan moral yang baik. Juli Alamsyah menyatakan harus memperhatikan pendidikannya terutama pendidikan untuk akhlaknya. Julia Fz (Ketua RT 003/02) yakni mempunyai tabungan untuk pendidikan anak di masa depan. Iman berharap menjadi anak-anak yang sukses dan berguna bagi orang tuanya dan bagi orang banyak. Caranya harus dipekerjakan yang layak. Matadi (Jasa angkutan kapal ferry) harus diberikan pendidikan umum dan agama karena persaingan semakin ketat. Abdullah (nelayan) Saya kasih dorongan supaya dapat membentengi diri sendiri. Nurfadli (Petugas Prasarana dan Sarana Umum/PPSU Kel. Pulau Untung Jawa) lebih mudahnya mencari lapangan pekerjaan khususnya putra putri pulau Untung Jawa. Abdul Rahman/ Staf kelurahan mengikuti pendidikan formal dan informal agar siap kerja. Fahrul Roji (Guru Honor) membimbing ke arah yang positif dan mempersiapkan bekal agar tahu apa yang dituju.

Berdasarkan wawancara di Pulau Untung Jawa, 16 November 2015 tentang peran pemerintah memajukan warga Untung Jawa selama ini, Nurhafa (wiraswasta) peran pemerintah ada namun belum optimal, Muchlis (nelayan) sudah ada namun belum optimal. Sarman (nelayan) peran dari pemerintah ada, namun belum optimal. Suryadi (wiraswasta) Belum puas, saya melihat peran pemerintah hanya di bidang infrastruktur di segala sarana dan prasarana umum saja, akan tetapi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat belum maksimal sehingga masyarakat masih jalan sendiri-sendiri tanpa adanya pengontrakan yang berkelanjutan. Sartono (PNS) dalam segi pendidikan pemerintah sudah cukup memperhatikan yaitu dengan membangun sekolah-sekolah di kepulauan seribu tetapi untuk kuliah masih harus ke daerah lain. Umiyatin (pedagang) belum

memuaskan karena masih ada ketimpangan sosial dan kecemburuan sosial. A.Gofar (PNS) Peran pemerintah cukup banyak dirasakan oleh masyarakat dan masih perlu ditingkatkan kembali, terutama dalam hal pemberian pelatihan dan permodalan usaha-usaha pariwisata dan lainnya. Juli Alamsyah Belum memuaskan. Julia Fz (Ketua RT 003/02) menyatakan cukup memuaskan. Iman belum cukup. Matadi (Jasa angkutan kapal ferry) belum karena masih banyak yang perlu dibina dan dibangun infrastruktur. Abdullah (nelayan) peran pemerintah sudah cukup memberi sosialisasi. Nurfadli (PPSU Kel. Pulau Untungjawa) merasa sudah cukup. Abdul Rahman (Staf kelurahan) cukup memuaskan. Fahrul Roji (Guru Honor) peran pemerintah sudah cukup jauh lebih cukup tapi belum puas.

Berdasarkan wawancara di Pulau Untung Jawa, 16 November 2015, kebutuhan guna pengembangan diri dan pembangunan pulau Untung Jawa, menurut Nurhafa (wiraswasta) yakni modal (belum dapat modal yang mencukupi, penyuluhan hanya seremonial saja, pelatihan tidak didukung sarana dan prasarana). Muchlis (nelayan) selain permodalan juga keterampilan. Sarman (nelayan) menyatakan perlu bantuan alat tangkap dari pemerintah dan perlengkapannya.

Suryadi (wiraswasta) menyatakan perlu permodalan, keterampilan, pelatihan dan penyuluhan itu sudah pasti, semua perlu adanya pendampingan atau pengontrolan agar semua dapat berjalan baik. Sartono (PNS) perlunya merubah pola pikir anak-anak. Jangan hanya bermimpi menjadi seorang guru/pns tetapi menjadi seorang pengusaha/ menciptakan lapangan pekerjaan. Umiyatin (pedagang) perlunya modal, pelatihan keterampilan yang dapat dikembangkan dan digunakan oleh khususnya ibu-ibu umumnya remaja yang ada di pulau ini.

A.Gofar (PNS) perlu sosialisasi dan pelatihan keterampilan berupa kursus montir dan usaha kegiatan pariwisata serta bidang keterampilan lain. Juli Alamsyah perlu modal serta pelatihan keterampilan. Matadi (Jasa angkutan kapal ferry) mentaati hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Abdullah (nelayan) penyuluhan yang sesuai dengan SDM tepat pada sasaran. Nurfadli (PPSU Kel. Pulau UntungJawa) menyatakan perlu pelatihan kewirausahaan khususnya warga UntungJawa. Abdul Rahman (Staf kelurahan) ingin keterampilan sesuai lapangan

kerja baik di pulau dan di luar pulau. Fahrul Roji (Guru Honor) ingin pembinaan generasi muda dan pemberian modal tanpa kembali.

Berdasarkan wawancara di Pulau Untung Jawa, 16 November 2015; bantuan, pelatihan atau penyuluhan yang pernah diterima warga Untung Jawa menurut Nurhafa (wiraswasta) dari bidang perikanan yaitu pelatihan keterampilan (membuat alat tangkap nelayan). Muchlis (nelayan) pernah dari perikanan (dinas perikanan). Sarman (nelayan) dari dinas kelautan dan perikanan, contohnya alat tangkap namun belum optimal. Suryadi (wiraswasta) dari sudin UMKM tapi hanya pelatihan. Sartono (PNS) pernah ada, dari pihak perikanan.

Umiyatin (pedagang) pelatihan dari dinas pendidikan, pariwisata, perikanan & kelautan. A.Gofar/PNS dan Juli Alamsyah menyatakan pernah mengikuti pelatihan dan penyuluhan dari segala institusi. Ketua RT 003/02 juga menyatakan pernah dari kelurahan. Iman menyatakan dari dinas sosial dan BPM, Matadi (Jasa angkutan kapal fery) menyatakan pernah mengikuti pelatihan pariwisata/PPMK, dikuatkan Abdullah (nelayan) penyuluhan sudah, bantuan belum. Nurfadli/ PPSU Kel. Pulau Untung Jawa menyatakan pernah dari pihak pariwisata. Abdul Rahman (Staf kelurahan) menyatakan juga pernah dari Dinas Sosial dan pariwisata.

Ketika diminta pendapat siapa saja atau institusi mana saja yang menurut warga Untung Jawa paling tepat untuk (bertanggungjawab) bekerjasama membangun pulau Untung Jawa, menurut Nurhafa (wiraswasta) adalah semua institusi pemerintah, Muchlis (nelayan) mengatakan Dinas Perikanan, kelautan, pariwisata, perhubungan, UMKM, dan perindustrian, sedangkan Sarman (nelayan) berpendapat terutama instansi setempat. Umiyatin (pedagang) semua warga Pulau Untung Jawa juga semua instansi terkait yang ada dalam pemerintahan. A.Gofar (PNS) menyatakan Dinas Pariwisata, Kelautan dan Perikanan. Juli Alamsyah menyatakan institusi swasta dan pemerintah, Julia Fz (Ketua RT 003/02) Kelurahanlah yang paling bertanggungjawab; sedangkan menurut Iman adalah pemerintah dan swasta. Matadi/ Jasa angkutan kapal fery berpendapat institusi yang terkait pemerintah dan masyarakat. Abdullah (nelayan) menyatakan yang bertanggungjawab adalah masyarakat pulau sendiri. Nurfadli (PPSU Kel. Pulau Untung Jawa) menyatakan kelurahan, masyarakat, polisi, pelaku wisata, instansi

terkait. Abdul Rahman (Staf kelurahan) menyatakan pemerintah kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Fahrul Roji (Guru Honor) berpendapat Pemda, pihak swasta, perangkat kelurahan lah yang paling bertanggungjawab.

Mengenai terciptanya kesadaran hukum menurut warga pulau Untung Jawa, Nurhafa (wiraswasta) belum tercapai maksimal, Muchlis (nelayan) menyatakan hampir 70% sudah mempunyai kesadaran hukum, menurut Sarman (nelayan) sudah tercipta. Sartono (PNS) belum tercipta, karena buang sampah saja masih sembarangan. Masih perlu diberikan sosialisasi tentang materi hukum dan kesadaran hukum. Umiyatin (pedagang) menyatakan konsep kesadaran hukum adalah kesadaran dalam melakukan segala macam kegiatan yang sesuai dengan hukum yang ada, yang menurutnya sebagian sudah tercipta.

A.Gofar (PNS) menyatakan konsep kesadaran hukum adalah mematuhi semua peraturan hukum dan perundangan yang berlaku di negara RI, yang menurutnya secara menyeluruh belum tercipta, untuk itu perlu terus diberikan edukasi, sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada masyarakat. Juli Alamsyah, Matadi dan Abdullah menyatakan kesadaran hukum untuk mencari keadilan belum tercipta. Julia Fz (Ketua RT 003/02) menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah sadar akan peraturan yang berlaku, yang menurut Iman adalah sadar akan aturan yang telah di buat oleh pemerintah, dan pelaksanaannya masih kurang. Abdul Rahman (Staf kelurahan) menyatakan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan hukum formal dan hukum sosial masyarakat.

Terkait dengan kemandirian nelayan Nurhaifa (wiraswasta) menyatakan kemandirian adalah di mana seseorang atau kelompok mampu mengelola berbagai permasalahan dan menyelesaikannya tanpa bantuan orang lain. Di pulau Untung Jawa belum terlaksana secara maksimal. Muchlis (nelayan) mneyatakan belum sepenuhnya mandiri karena masih banyak dipengaruhi faktor eksternal atau wilayah luar khususnya masyarakat Tangerang Banten. Konsep pemberdayaan menurut warga di antaranya Nurhafa menyatakan pemberdayaan yang benar-benar pada posisinya sehingga tidak salah pemanfaatannya. Melibatkan nelayan, pedagang, dll, yang menurut Muchlis (nelayan) paling tidak pihak instansi terkait harus lebih serius dan mau mendampingi dan sekaligus memberikan pemasaran

yang berkelanjutan dari hasil program pemberdayaan dan usaha kecil, dan Sarman (nelayan) berpendapat masyarakat lebih berdaya lagi dan jangan apatis.

A.Gofar (PNS) menyatakan program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan perekomian serta pariwisata, dan Juli Alamsyah menambahkan pemberdayaan yang melibatkan pemerintah daerah, ditunjang oleh pelbagai pelatihan yang menurut Iman Iman berupa bantuan dan pelatihan wirausaha yang melibatkan masyarakat, Abdullah menambahkan peran yang paling penting adalah UKM. Nurfadli (PPSU) Kel. Pulau Untung Jawa menyatakan Wirausaha, pariwisata & kebudayaan dan Fahrul Roji, menyatakan pembinaan usaha kecil yang produktif, olahan rumahan, dan IRT diberikan kegiatan yang menghasilkan uang.

Pelatihan dan penyuluhan yang pernah diterima oleh warga Untung Jawa antara lain tentang narkoba, perkawinan, perceraian, kadarkum, PBB, pertanahan, kelautan, UU perikanan, ketertiban umum, KDRT, perlindungan anak dan pajak. Guna pemberdayaan dan pengembangan pulau Untung Jawa Nurhafa (wiraswasta) mengusulkan perlu diadakan sosialisasi tentang SDA dan SDM, pelatihan, permodalan, studi banding, dan melatih bagaimana melestarikan sumber daya alam. Sarman (nelayan) SDM dan SDA cukup berkembang. Suryadi (wiraswasta) pengembangan SDM harus terus ditingkatkan untuk program pemerintahan, seperti pelatihan. Sedangkan SDA di pulau kami sangat mendukung khususnya di bidang wisata, tetapi penataan wisata harus ditingkatkan lagi, sedangkan Sartono (PNS) menyatakan masih perlu pengembangan SDM dan SDA. A.Gofar (PNS) menyatakan

SDM perlu ditingkatkan melalui edukasi pendidikan formal maupun nonformal melalui pelatihan dan kursus-kursus, sedangkan Juli Alamsyah menyatakan sumber daya manusia sudah mulai dikembangkan, yang masih kurang adalah kesadaran manusia untuk menjaga sumber daya alam dan menurut Julia Fz (Ketua RT 003/02) kerajinan tangan dan hasil laut, juga Iman menyatakan perlunya pelatihan dan pengelolaan SDA.

Hambatan yang selama ini menjadi kendala warga Untung Jawa adalah sebagaimana dikatakan oleh Nurhafa (wiraswasta) dan Sartono kemudahan pinjam modal dari koperasi simpan pinjam, Umiyatin (pedagang) juga kemudahan

saat mengurus surat-surat di kelurahan, A.Gofar(PNS) dan Juli Alamsyah kemudahan dalam pelayanan di kelurahan pulau Untung Jawa, termasuk menurut Abdullah (nelayan) kemudahan membuat KK, KTP dan akte kelahiran, SKTM, pendataan, informasi (signal kurang bagus) dan transportasi. Warga juga sangat memerlukan bantuan hukum dan perlindungan hukum seperti diutarakan oleh Suryadi, Sartono, Iman dan pelatihan manajemen usaha dan keterampilan pembuatan alat tangkap ikan, keterampilan sablon, kuliner, tour-guide seperti dinyatakan oleh Sarman, Suryadi, Sartono dan A.Gofar. A.Gofar (PNS) mengeluhkan bahwa nelayan pulau untung jawa selama ini merasa terganggu dengan beroperasinya kapal jaring, apakah jenis jaring tersebut termasuk kategori yang dilarang atau tidak.

Model Pemberdayaan

Perlu sinergitas antara peran pemerintah baik aparat kelurahan dan instansi terkait lainnya, LSM yang peduli atau pun perusahaan, kampus maupun masyarakat nelayan itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini Kelurahan selama ini sudah mewadahi aspirasi masyarakat namun masih banyak kendala dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Pemerintah seharusnya lebih melindungi lagi, dan masyarakat terus berpartisipasi meningkatkan kemampuan/kompetensi diri agar mampu bertahan hidup dan sukses sebagai nelayan.

Berikut gambar model yang dihasilkan :



Faktor penghambat dan pendukung kemandirian nelayan UntungJawa adalah:

Faktor penghambat:

- a. Terbatasnya modal
- b. Hambatan alam yaitu musim angin barat dan musim hujan angin
- c. Banyaknya nelayan di luar pulau UntungJawa yang menggunakan jaring dogol/jaring arat/jaring dokdok karena alat tangkap tersebut sangat merusak terumbu karang
- d. Kurangnya gairah wisata, daya minat beli dan daya minat permainan air
- e. Biaya kehidupan sehari-hari di pulau Seribu (termasuk UntungJawa) 2x lipat dibanding biaya di daratan
- f. Tidak adanya penghasilan rutin atau pasti
- g. Pembayaran honor pekerja yang kurang dari UMP
- h. Pengunjung yang datang ke pulau UntungJawa sekarang di pulang-pergikan dari Tanjung Pasir
- i. SDM perlu ditingkatkan melalui edukasi pendidikan formal maupun nonformal
- j. Kurangnya kesadaran untuk menjaga sumber daya alam
- k. Kurangnya kemudahan pinjam modal dari koperasi simpan pinjam
- l. Kurangnya kemudahan urusan surat-surat di kelurahan, pendataan, informasi dan transportasi
- m. Kurangnya kesadaran hukum, bantuan hukum dan perlindungan hukum
- n. Kurangnya pelatihan manajemen usaha dan keterampilan pembuatan alat tangkap ikan, keterampilan sablon, kuliner, dan *tour-guide*
- o. Banyak rampok

Faktor pendukung:

- a. Sudah terbangun konsep kesadaran dalam melakukan segala macam kegiatan yang sesuai dengan hukum yang ada
- b. Potensi wisata dan produksi perikanan

- c. Aparat Kelurahan yang cukup aktif
- d. Kesiapan SDM untuk memotivasi diri dan menerima pendampingan serta berbagai pelatihan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Model pemberdayaan yang bertujuan membangun kemandirian nelayan pulau UntungJawa dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Perlu sinergitas antara peran pemerintah baik aparat kelurahan dan instansi terkait lainnya, LSM yang peduli atau pun perusahaan, kampus maupun masyarakat nelayan itu sendiri.
2. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang harus diperhatikan dan dicarikan solusinya. Faktor pendukung antara lain sudah terbangun konsep kesadaran dalam melakukan segala macam kegiatan yang sesuai dengan hukum yang ada, potensi wisata dan produksi perikanan, aparat Kelurahan yang cukup aktif dan kesiapan SDM untuk memotivasi diri dan menerima pendampingan serta berbagai pelatihan. Adapun faktor penghambatnya antara lain: terbatasnya modal, faktor alam, sarana prasarana, kurangnya gairah wisata, daya minat beli dan daya minat permainan air, tidak adanya penghasilan rutin, honor pekerja yang kurang dari UMP, SDM, dan kurangnya kesadaran hukum, bantuan hukum dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah M., M. Oktaufik, 2000, “Tantangan dan Peluang Teknologi Industri” dalam *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol 1 No. 1 Universitas Gajayana Malang
- Endang Purwaningsih, 2015. *Sertifikasi Produk*, Jenggala Pustaka Utama.
- Endang Purwaningsih, 2009. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Kediri: Jenggala Pustaka Utama.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada
- Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996. *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan. Sosiologi*. Jakarta. Pustaka Pelajar.
- Marzuki Usman, 2001, *Pasar Bebas, Dunia Usaha, dan Pemerataan Ekonomi*, *Jurnal Reformasi Ekonomi*, vol. 2 No. 1 LSPUE.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2001, “Penelitian Hukum.” *Jurnal Yuridika FH UNAIR* vol.16 Nomor 1
- Nikijuluw, Victor, PH. 2003. *Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Strategi Pemberdayaan dalam konsteks Pengelolaan Sumber Daya Pesisir secara Terpadu*. USAID-Indonesia Coastal Resources Management Project
- Rahardjo, Dawam M, 2001. “Peran Negara dalam Proses Demokratisasi Ekonomi” *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 2 Nomor 1 Indonesia, LSPUE.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*,. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media,. Jogjakarta
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media,. Jogjakarta
- Tuwo, H. Ambo. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*. Surabaya: Brilian Internasional.
- wulandarihastuti.blogspot.com/.../pemberdayaan-masy.. diakses 20 Feb 2015